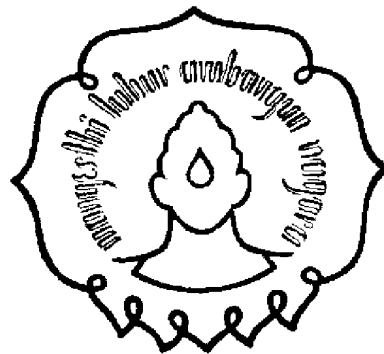


**ANALISIS SUBSEKTOR PERTANIAN BASIS DAN KOMPONEN  
PERTUMBUHAN TANAMAN BAHAN MAKANAN  
DI PROVINSI JAWA TENGAH  
(PENDEKATAN *LOCATION QUOTIENT* DAN *SHIFT SHARE ANALYSIS*)**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh derajat Sarjana Pertanian  
di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret**

**Jurusan/Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis**



**Oleh:  
Hamdan Sultoni  
H 0305068**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2009**

**ANALISIS SUBSEKTOR PERTANIAN BASIS DAN KOMPONEN  
PERTUMBUHAN TANAMAN BAHAN MAKANAN  
DI PROVINSI JAWA TENGAH  
(PENDEKATAN *LOCATION QUOTIENT* DAN *SHIFT SHARE ANALYSIS*)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Hamdan Sultoni

H0305068

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal : 31 Desember 2009

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Anggota I

Anggota II

Dr. Ir. Darsono, M.Si.  
NIP. 19660611 199103  
1 002

Ir. Heru Irianto, MM.  
NIP. 19630514 199202  
1 001

R. Kunto Adi, SP. MP  
NIP. 19731017 200312  
1 002

Surakarta, Januari 2010

Mengetahui,

Universitas Sebelas Maret

Fakultas Pertanian

Dekan

Prof. Dr. Ir. H. Suntoro, M.S.  
NIP. 1955 1217 198203 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Subsektor Pertanian Basis dan Komponen Pertumbuhan Tanaman Bahan Makanan di Provinsi Jawa Tengah (Pendekatan *Location Quotient* dan *Shift Share Analysis*)”** sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Suntoro, M.S. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Ir. Catur Tunggal B.J.P., M.S. (Alm) selaku Ketua Jurusan/Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Ir. Agustono, M.Si selaku Ketua Komisi Sarjana Jurusan/Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Dr. Ir. Darsono, M.Si. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ir. Heru Irianto, MM. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan bagi Penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi.
6. Bapak R. Kunto Adi, SP. MP selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta atas ilmu yang telah diberikan dan bantuannya selama masa perkuliahan Penulis di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Mbak Ira, pak Samsuri, dan staff TU Jurusan/Prodi Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta dan seluruh

karyawan Fakultas Pertanian UNS, terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang telah diberikan.

9. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah beserta staf yang telah membantu menyediakan data yang Penulis butuhkan.
10. Bapakku (Siswoto) dan Ibundaku tercinta (Ida Turyatun) yang telah merawatku, memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan semangat hidup.
11. Adikku (Reza Winasis dan Messyda Amalia Latih) yang memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan semangat hidup.
12. Eyangku (Sarjo Harjo Suwiryono (Alm) dan Karlin) serta segenap keluarga besarku terima kasih atas dukungan doa dan motivasi yang telah diberikan.
13. Sahabat-sahabat baikku : Simbah, Bento, Didit, Gulan, Sipex, Hafidh, Nasir, Patrik, Rahardian, Andre, Panji, Hendy dan Cecep, terima kasih atas jalinan persahabatan yang indah yang telah kalian berikan.
14. Keluarga besar Agrobisnis 2005 terima kasih atas kenangan dan kebersamaan di kampus ini.
15. Keluarga besar tim Futsal “BJP” Agrobisnis 05’ terima kasih atas kebersamaannya dalam suka dan duka sebuah pertandingan.
16. Keluarga besar Himaseta FP UNS terima kasih atas kebersamaannya di kampus ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Surakarta, Desember 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>SUMMARY</b> .....	xiii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>II. LANDASAN TEORI</b> .....	6
A. Tinjauan Pustaka .....	6
1. Pembangunan .....	6
2. Pembangunan Daerah .....	7
3. Pembangunan Ekonomi .....	7
4. Pembangunan Sektor Pertanian .....	8
5. Pembangunan Subsektor Tanaman Bahan Makanan .....	9
6. Otonomi Daerah .....	9
7. Teknik Analisis Potensi Wilayah .....	10
8. Teori Ekonomi Basis .....	13
9. Teori Komponen Pertumbuhan Wilayah .....	15
B. Penelitian Terdahulu .....	17
C. Kerangka Teori Pendekatan Masalah .....	19
D. Pembatasan Masalah .....	23
E. Asumsi-asumsi .....	23
F. Definisi Operasional dan Konsep Pengukuran Variabel .....	23
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	26
A. Metode Dasar Penelitian .....	26
B. Metode Pengambilan Daerah Penelitian .....	26
C. Jenis dan Sumber Data .....	27
D. Metode Analisis Data .....	28
1. Analisis Subsektor Tanaman Bahan Makanan Basis .....	28
2. Analisis Komponen Pertumbuhan Subsektor Tanaman Bahan Makanan Basis .....	29

3. Analisis Penentuan Prioritas Pengembangan Subsektor Tanaman Bahan Makanan Basis .....	31
<b>IV. KONDISI UMUM PROVINSI JAWA TENGAH .....</b>	<b>32</b>
A. Keadaan Alam.....	32
1. Letak Geografis dan Wilayah Administratif .....	32
2. Keadaan Iklim dan Curah Hujan.....	32
3. Luas Penggunaan Lahan .....	32
B. Keadaan Penduduk.....	34
1. Jumlah Penduduk .....	34
2. Komposisi Penduduk .....	36
C. Keadaan Perekonomian.....	39
1. Sektor Perekonomian .....	39
2. Sektor Pertanian .....	41
<b>V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Subsektor Tanaman Bahan Makanan Basis di Masing-masing Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.....	44
B. Komponen Pertumbuhan Proporsional dan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Subsektor Tanaman Bahan Makanan Basis di Masing-masing Kabupaten Provinsi Jawa Tengah.....	74
1. Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) Subsektor Tanaman Bahan Makanan Basis di Masing-masing Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.....	74
2. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) Subsektor Tanaman Bahan Makanan Basis di Masing-masing Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.....	76
C. Prioritas Pengembangan Subsektor Tanaman Bahan Makanan Basis di Masing-masing Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pendekatan LQ, PP, dan PPW .....	85
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 1.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan 2000 di Jawa Tengah Tahun 2003-2007 ....	2
Tabel 2.	Produksi Tanaman Bahan Makanan Tahun 2003-2007 di Provinsi Jawa Tengah .....	4
Tabel 3.	Luas Penggunaan Lahan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007 .....	5
Tabel 4.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Atas Harga Konstan 2000 di Jawa Tengah Tahun 2003-2007 .....	27
Tabel 5.	Penentuan Prioritas Pengembangan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan Basis di Provinsi Jawa Tengah.....	31
Tabel 6.	Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 .....	33
Tabel 7.	Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007 .....	35
Tabel 8.	Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 200-2007 .....	36
Tabel 9.	Komposisi Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Kelompok Umur dan ABT Tahun 2007.....	37
Tabel 10.	Komposisi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Provinsi Jawa Tengah yang Bekerja Menurut Lapangan pekerjaan Tahun 2007	38
Tabel 11.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2007 (dalam Jutaan Rupiah) .....	39
Tabel 12.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2007 (Persen).....	41
Tabel 13.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2006-2007 (dalam Jutaan Rupiah).....	42
Tabel 14.	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2007 (Persen) .....	43
Tabel 15.	Nilai LQ Masing-masing Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007 .....	45
Tabel 16.	Kontribusi Masing-masing Subsektor Terhadap Pembentukan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Cilacap .....	47

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 17.	Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Cilacap.....	48
Tabel 18.	Kontribusi Masing-masing Subsektor Terhadap Pembentukan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Banjarnegara.....	49
Tabel 19.	Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Banjarnegara .....	50
Tabel 20.	Kontribusi Masing-masing Subsektor Terhadap Pembentukan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo.....	51
Tabel 21.	Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Wonosobo.....	52
Tabel 22.	Kontribusi Masing-masing Subsektor Terhadap Pembentukan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Magelang .....	53
Tabel 23.	Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Magelang .	54
Tabel 24.	Kontribusi Masing-masing Subsektor Terhadap Pembentukan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Klaten.....	55
Tabel 25.	Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Klaten	56
Tabel 26.	Kontribusi Masing-masing Subsektor Terhadap Pembentukan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Sukoharjo.....	57
Tabel 27.	Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Sukoharjo .	58
Tabel 28.	Kontribusi Masing-masing Subsektor Terhadap Pembentukan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Wonogiri.....	59
Tabel 29.	Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Wonogiri.....	60
Tabel 30.	Kontribusi Masing-masing Subsektor Terhadap Pembentukan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Sragen .....	61
Tabel 31.	Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Sragen.....	62
Tabel 32.	Kontribusi Masing-masing Subsektor Terhadap Pembentukan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang.....	63
Tabel 33.	Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Rembang	65
Tabel 34.	Kontribusi Masing-masing Subsektor Terhadap Pembentukan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Demak.....	66
Tabel 35.	Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Demak .....	67



<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 36.	Kontribusi Masing-masing Subsektor Terhadap Pembentukan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Grobogan .....	68
Tabel 37.	Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Grobogan .....	70
Tabel 38.	Kontribusi Masing-masing Subsektor Terhadap Pembentukan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Tegal .....	71
Tabel 39.	Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Tegal .....	71
Tabel 40.	Kontribusi Masing-masing Subsektor Terhadap Pembentukan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Brebes .....	72
Tabel 41.	Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Brebes.....	73
Tabel 42.	Nilai Pertumbuhan Proporsional (PP) Subsektor Tanaman Bahan Makanan Basis Masing-masing Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah .....	75
Tabel 43.	Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) Subsektor Tanaman BahanMakanan Basis di Masing-masing Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007.....	77
Tabel 44.	Prioritas Pengembangan Subsektor Tanaman Bahan Makanan Basis di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Pendekatan LQ, PP, dan PPW.....	86

## DAFTAR GAMBAR

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.	Alur Pemikiran Dalam Penentuan Prioritas Pengembangan Subsektor Tanaman Bahan Makanan Basis Masing-masing Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.....	22

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Nilai LQ Rata-Rata Subsektor Tanaman Bahan Makanan Basis Masing-masing Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007 .....	90
Lampiran 2.	Analisis <i>Shift Share</i> Subsektor Tanaman Bahan Makanan Basis Masing-masing Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007 .....	92

## RINGKASAN

Hamdan Sultoni, 2009. “**Analisis Subsektor Pertanian Basis dan Komponen Pertumbuhan Tanaman Bahan Makanan di Provinsi Jawa Tengah (Pendekatan *Location Quotient* dan *Shift Share Analysis*)**”. Di bawah bimbingan Dr. Ir. Darsono, M. Si. dan Ir. Heru Irianto, MM. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sangat tergantung pada kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di daerahnya. Pengoptimalan potensi subsektor tanaman bahan makanan dapat dilakukan dengan penentuan prioritas pengembangan subsektor yang menjadi basis di masing-masing kabupaten. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis subsektor tanaman bahan makanan basis di masing-masing kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, menganalisis subsektor tanaman bahan makanan basis yang mempunyai pertumbuhan cepat dan daya saing yang baik di masing-masing kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, menganalisis subsektor tanaman bahan makanan basis yang diprioritaskan untuk dikembangkan di masing-masing kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Metode pengambilan daerah penelitian dilakukan secara *purposive*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi PDRB tiap kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2007. Metode analisis data yang digunakan yaitu LQ, analisis *Shift Share*, dan gabungan LQ dan *Shift Share*.

Hasil penelitian menunjukkan kabupaten dengan subsektor tanaman bahan makanan basis, yaitu Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Rembang, Demak, Tegal, dan Brebes. Dari hasil Analisis *Shift Share* menunjukkan komponen pertumbuhan proporsional sektor tanaman bahan makanan basis di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten dengan subsektor tanaman bahan makanan basis yang mempunyai pertumbuhan cepat di Provinsi Jawa Tengah yaitu, Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Rembang, Demak, Tegal, dan Brebes. Sedangkan hasil analisis komponen pertumbuhan pangsa wilayah subsektor tanaman bahan makanan basis di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten dengan subsektor tanaman bahan makanan basis yang mempunyai daya saing di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Banjarnegara, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Rembang, Grobogan, dan Demak. Berdasarkan hasil analisis prioritas pengembangan subsektor tanaman bahan makanan basis di Provinsi Jawa Tengah dapat di ketahui kabupaten dengan subsektor tanaman bahan makanan basis yang menjadi prioritas utama pengembangan adalah Kabupaten Banjarnegara, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Rembang, Grobogan, dan Demak. Kabupaten dengan subsektor tanaman bahan makanan basis menjadi prioritas kedua pengembangan adalah Kabupaten Cilacap, Wonosobo, Magelang, Tegal, dan Brebes.

## SUMMARY

Hamdan Sultoni, 2009. "**Analysis of Base Subsector of Agriculture and Growth Component of Food Crops at Central Java Province (Location Quotient and Shift Share Analysis Approach)**". Under guidance of Dr.Ir. Darsono M.Si. and Ir. Heru Irianto, MM. Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University, Surakarta.

Success of local development very depends on region ability to develop the existing potential in its area. Optimizing of food crops subsector potency can be done with the determination of subsector development priority becoming bases in each regency. The aims of this research are to analyze food crops subsector in each regency of Central Java Province, analyze food crops subsector having growth quickly and having competitiveness in each regency of Central Java, to analyze food crops subsector which priority to be developed in each regency of Central Java.

The basic method in this research is descriptive analitic. Method of intake the research area conducted by purposive. The data which used is secondary data covering PDRB data every regency at Central Java at 2003-2007. The data analysis which used are Location Quotient analysis, Shift Share analysis, and combine both Location Quotient and Shift Share analysis.

The result shows that regions which have basis food crops subsector are Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. The result of shift share analyzing method show the proportional development component of food crops subsector in Central Java, basis food component subsector which rapidly grows are Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Rembang, Demak, Tegal, dan Brebes. The result of growth analyzing show that competitive subsector of food crops subsector basis are Banjarnegara, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Rembang, Grobogan, dan Demak. The result priority to be developed in each regency in each regency of Central Java can be analyzed that prioritized food crops subsector is Banjarnegara, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Rembang, Grobogan, dan Demak, the second priority subsector are Cilacap, Wonosobo, Magelang, Tegal, and Brebes.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara untuk memperoleh tatanan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, pembangunan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, serta melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Pembangunan Indonesia tidak terlepas dari pembangunan daerah di Indonesia karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dalam upaya mencapai sasaran nasional di daerah sesuai dengan potensi, aspirasi dan keinginan masyarakat daerah. Diberlakukannya UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai potensi dan aspirasi masyarakatnya sehingga mendorong daerah tersebut untuk lebih mandiri. Sasaran pembangunan akan terwujud apabila pemerintah daerah mengetahui potensi daerah sehingga dapat merumuskan strategi kebijakan pengembangan seluruh sektor dengan tepat.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2005). Pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan taraf penghidupan masyarakat, tingkat kemakmuran semakin tinggi, ketimpangan pendapatan terus berkurang, kesempatan kerja semakin luas, dan kualitas sumber daya manusia semakin membaik. Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia harus mampu memutuskan kebijakan daerahnya melalui pemerintah setempat. Kebijakan daerah Provinsi Jawa Tengah ini akan sangat menentukan pembangunan ekonomi regional di daerah ini. Potensi yang ada di Provinsi

Jawa Tengah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi regional Provinsi Jawa Tengah.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor perekonomian yang memiliki peranan penting bagi Provinsi Jawa Tengah. Pertanian memiliki lima subsektor yaitu, tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Subsektor tanaman bahan makanan sebagai salah satu bagian dari sektor Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting karena subsektor tanaman bahan makanan berpengaruh pada penyediaan pangan dan bahan baku di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah mempunyai potensi yang cukup besar di subsektor tanaman bahan makanan yaitu sebesar 20,03% (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2008) menyumbang total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Tabel 1. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan 2000 di Jawa Tengah Tahun 2003-2007

No.	Lapangan Usaha	2003	2004	2005	2006	2007
<b>1.</b>	<b>Pertanian</b>	<b>21,03</b>	<b>21,07</b>	<b>20,92</b>	<b>20,57</b>	<b>20,03</b>
2.	Pertambangan dan Galian	1,00	0,98	1,02	1,11	1,12
3.	Industri Pengolahan	32,01	32,40	32,23	31,98	31,97
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,76	0,78	0,82	0,83	0,84
5.	Bangunan	5,35	5,49	5,57	5,61	5,69
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	21,42	20,87	21,01	21,11	21,30
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,82	4,79	4,89	4,95	5,06
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa	3,60	3,55	3,54	3,58	3,62
9.	Jasa-jasa	10,02	10,06	10,01	10,25	10,36
	<b>PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2008

Pengembangan subsektor tanaman bahan makanan di Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari kontribusi subsektor tanaman bahan makanan di tiap-tiap kabupaten di Jawa Tengah. Setiap kabupaten mempunyai potensi subsektor tanaman bahan makanan yang berbeda berdasarkan sumber daya

yang dimiliki dan kondisi wilayahnya. Oleh karena itu kajian yang lebih mendalam mengenai kabupaten manakah yang mempunyai potensi subsektor tanaman bahan makanan untuk dikembangkan di Provinsi Jawa Tengah ini perlu dilakukan.

## B. Perumusan Masalah

Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah melaksanakan program-program pembangunannya, sehingga pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada daerah tersebut.

Sumberdaya alam dan sumberdaya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya dapat dioptimalkan untuk kemanfaatan dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu potensi sumberdaya alam yang ada di Provinsi Jawa Tengah adalah potensi di sektor pertanian. Sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 5 subsektor, yaitu subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan.

Salah satu subsektor pertanian di Jawa Tengah adalah subsektor tanaman bahan makanan. Komoditi subsektor tanaman bahan makanan di Provinsi Jawa Tengah dengan Produksi terbesar dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Produksi Tanaman Bahan Makanan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007

Tahun	Produksi					
	Padi (Sawah&Gogo)	Ubi Kayu	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau
2003	8.123.839	3.469.795	1.926.243	142.315	174.332	91.553
2004	8.512.555	3.663.236	1.836.233	113.852	184.316	81.496
2005	8.424.096	3.478.970	2.191.258	167.107	185.796	85.191
2006	8,729.290	3.553.820	1.856.022	132.261	179.067	96.347
2007	8,616.855	3.410.469	2.233.992	123.209	174.438	94.672

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2008



Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi penyangga pangan di Indonesia sehingga produktivitasnya terutama tanaman padi perlu ditingkatkan. Pada tahun 2006 terjadi kenaikan produksi padi sebesar 3,7 % yaitu sebesar 305.194 ton, lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2005. Untuk produksi tanaman ubi kayu dan kacang hijau pada tahun 2006 juga mengalami peningkatan yaitu masing-masing sebesar 2,15 % (74.850 ton), 13,09 % (11.156 ton). Sedangkan produksi tanaman jagung, kedelai, dan kacang tanah mengalami penurunan sebesar 15,29 % (335.236 ton), 26,34 % (34.846 ton), dan 3,62 % (6.729 ton). Produksi subsektor tanaman bahan makanan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2007 didukung oleh ketersediaan lahan sawah. Luas penggunaan lahan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2003-2007 dapat dilihat dari Tabel 3.

Tabel 3. Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007

<b>Tahun</b>	<b>Lahan Sawah (Ha)</b>	<b>Lahan Bukan Sawah (Ha)</b>	<b>Jumlah Total (Ha)</b>
2003	995.469	2.258.943	3.254.412
2004	996.197	2.258.215	3.254.412
2005	995.972	2.258.440	3.254.412
2006	992.455	2.261.957	3.254.412
2007	990.824	2.263.588	3.254.412

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2008

Pengoptimalan pembangunan subsektor tanaman bahan makanan dapat dilakukan dengan penentuan prioritas pengembangan daerah yang menjadi basis. Berbagai kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, tentunya tidak semua memiliki potensi subsektor tanaman bahan makanan yang besar untuk dikembangkan. Kabupaten yang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan diharapkan dapat menjadikan subsektor tanaman bahan makanan sebagai pendorong perkembangan sektor perekonomian lainnya sehingga pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Apakah subsektor tanaman bahan makanan menjadi basis di masing-masing kabupaten di Provinsi Jawa Tengah ?

2. Apakah subsektor tanaman bahan makanan basis mempunyai pertumbuhan cepat dan daya saing yang baik di masing-masing kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari nilai komponen pertumbuhan proporsional (PP) dan nilai komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW)?
3. Apakah subsektor tanaman bahan makanan basis menjadi prioritas untuk dikembangkan di masing-masing kabupaten di Provinsi Jawa Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis subsektor tanaman bahan makanan yang menjadi basis di masing-masing kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis subsektor tanaman bahan makanan basis yang mempunyai pertumbuhan cepat dan daya saing yang baik di masing-masing kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis subsektor tanaman bahan makanan basis yang diprioritaskan untuk dikembangkan di masing-masing kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan topik penelitian.
2. Bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, khususnya pembangunan dan pengembangan sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah.
3. Bagi pembaca, sebagai bahan pustaka dalam menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **II. LANDASAN TEORI**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Pembangunan**

Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses transformasi dan proses tersebut membawa perubahan dalam alokasi sumber-sumber ekonomi, distribusi manfaat dari akumulasi yang membawa pada peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan (Arsyad, 2005).

Proses pembangunan sebagai proses sistemik, pada akhirnya akan menghasilkan keluaran (*output*) pembangunan, kualitas dari *output* pembangunan tergantung pada bahan masukan (*input*), kualitas dari proses pembangunan yang dilaksanakan, serta seberapa besar pengaruh lingkungan dan faktor-faktor alam lainnya. Bahan masukan pembangunan, salah satunya adalah sumber daya manusia, yang dalam bentuk konkritnya adalah manusia. Manusia dalam proses pembangunan mengandung beberapa pengertian, yaitu manusia sebagai pelaksana pembangunan, manusia sebagai perencana pembangunan, dan manusia sebagai sasaran dari proses pembangunan (*as object*) (Anonim, 2004).

Menurut Todaro (1998), pembangunan merupakan kenyataan fisik dan motivasi masyarakat untuk berusaha terus mencapai kehidupan yang lebih baik melalui kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional. Tiga tujuan inti pembangunan adalah :

- a. Peningkatan ketersediaan serta penguasaan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup tidak hanya peningkatan pendapatan tetapi juga penambahan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, dan peningkatan perhatian atas nilai kebudayaan dan kemanusiaan.
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yaitu dengan membebaskan dari sikap ketergantungan baik pada manusia/negara lain tetapi juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

## **2. Pembangunan Daerah**

Pembangunan daerah sebagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip Otonomi Daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasar prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Widjaya, 2004).

APBD sebagai instrumen kebijakan menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang menjadi preferensi daerah yang bersangkutan. Untuk memperlancar pelaksanaan program dan aktivitas yang telah direncanakan dan mempermudah pengendalian, pemerintah daerah dapat membentuk pusat-pusat pertanggungjawaban (*responsibility centers*) sebagai unit pelaksana (Mardiasmo, 2002).

### **3. Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi juga sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan sumber daya (*employment*) yang diupayakan secara terencana. Biasanya, peranan sektor pertanian akan turun untuk memberi kesempatan bagi tampilnya sektor-sektor manufaktur dan jasa-jasa yang selalu diupayakan untuk berkembang (Todaro, 1998).

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Jadi, pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses dimana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan seksama (Arsyad, 2005).

#### **4. Pembangunan Sektor Pertanian**

Strategi pembangunan pertanian dan pedesaan dimasa depan adalah Desentralisasi, agar kebijakan pembangunan wilayah pertanian sesuai potensi setempat serta mengapresiasi kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya sosial ekonomi dan lingkungan. Intervensi pemerintah sifatnya sangat selektif, hanya ketika terjadi kegagalan pasar. Pemerintah membantu memberdayakan petani lewat pengembangan teknologi, akses informasi dan modal, pengembangan mutu SDM dan profesionalisme kelembagaan (Buwono, 2001).

Pembangunan pertanian di Indonesia tetap dianggap terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi, apalagi semenjak sektor pertanian ini menjadi penyelamat perekonomian nasional karena justru pertumbuhannya meningkat, sementara sektor lain pertumbuhannya negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia :

- (1) potensi sumberdayanya yang besar dan beragam,
- (2) pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar,
- (3) besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini
- (4) menjadi basis pertumbuhan di pedesaan (Brawijaya, 2009).

Peran pertanian dalam pembangunan pertanian hanya sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah untuk berkembangnya sektor industri yang berfungsi sebagai unggulan dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Todaro, 2000).

#### **5. Pembangunan Subsektor Tanaman Bahan Makanan**

Tanaman pangan di Indonesia merupakan subsektor inti di dalam sektor pertanian. Sebagai pemasok kebutuhan pokok yang utama bagi manusia, yakni bahan makanan, kedudukan sektor tanaman pangan sangat strategis. Itulah sebabnya kepedulian terhadap sektor tanaman pangan sangat besar, jauh melebihi kepedulian terhadap subsektor-subsektor lain. Sektor tanaman pangan sering juga disebut sektor pertanian rakyat. Disebut demikian karena tanaman pangan biasanya diusahakan oleh

rakyat, maksudnya bukan oleh perusahaan atau pemerintah. Sektor ini mencakup komoditas-komoditas bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, serta sayur-sayuran dan buah-buahan (Dumairy, 1997).

Menurut Damardjati (1990) dalam pengembangan tanaman pangan sebagai komponen utama dalam industri pertanian, diperlukan sistem yang dilaksanakan dengan baik dalam memproduksi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Syarat-syarat yang perlu diusahakan dalam pengembangan tanaman pangan sebagai bahan baku industri pertanian adalah mendapatkan produk yang :

- a. Seragam, atau dengan cara tertentu dapat diseragamkan secara mudah
- b. Memenuhi standar mutu tertentu
- c. Dapat dihasilkan secara terus-menerus
- d. Dapat dikontrol pengolahannya
- e. Efisien dan dapat ditingkatkan sehingga siap bersaing dengan produk pasaran
- f. Dapat diperoleh dengan mudah dan dapat meningkatkan keuntungan.

## **6. Otonomi Daerah**

Keputusan politik pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001, telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi Daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik birokratis ke arah desentralistik partisipatoris. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten dan kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah (Subagyo, 2003).

Kebijakan pemberian Otonomi Daerah dan Desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. *Pertama*, Otonomi Daerah dan Desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). *Kedua*, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002).

## 7. Teknik Analisis Potensi Wilayah

Menurut Budiharsono (2005), ada beberapa teknik analisis potensi wilayah yang dapat digunakan dalam pembangunan wilayah pesisir dan lautan untuk membantu memformulasikan kebijakan maupun evaluasi pelaksanaan kebijakan. Teknik analisis tersebut antara lain: Model Ekonomi Basis, Model Input-Output, Program Linier, Program Tujuan Ganda, Biaya Sumber Daya Domestik, Analisis *Shift Share*, Sosiogram dan Skalogram, dan Evaluasi Proses Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan.

Teknik *Input-Output* digunakan untuk menelaah keterkaitan antar-industri dalam upaya untuk memahami kompleksitas perekonomian serta kondisi untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Beberapa penerapan model *Input-Output* di dalam perencanaan pembangunan : (Arsyad, 2005)

- a. Model *Input-Output* memberikan kepada setiap sektor perekonomian perkiraan tentang tingkat produksi dan impor yang sesuai satu sama lain dan sesuai dengan perkiraan permintaan akhir.
- b. Solusi model ini membantu pengalokasian investasi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat produksi dan model ini memberikan pengujian yang lebih tajam mengenai cukup tidaknya sumber investasi yang tersedia.

- c. Kebutuhan akan tenaga kerja terdidik juga dapat dievaluasi dengan cara yang sama.
- d. Dengan adanya pengetahuan tentang penggunaan bahan baku impor dan buatan dalam negeri dalam berbagai bidang dalam perekonomian, analisis tentang kebutuhan impor dan kemungkinan substitusi menjadi lebih mudah.
- e. Sebagai tambahan terhadap kebutuhan langsung akan modal, tenaga kerja, dan impor; kebutuhan tidak langsung pada sektor-sektor lain perekonomian juga dapat diperkirakan.
- f. Model *Input-Output* secara regional juga dapat dibuat untuk tujuan perencanaan, untuk menjajagi implikasi program pembangunan wilayah tertentu, ataupun untuk perekonomian secara keseluruhan.

Teknik Program Linier merupakan teknik matematika untuk menemukan keputusan yang optimal, dengan tunduk kepada kendala tertentu, dalam bentuk ketidaksamaan linier. Program linier ini merupakan suatu model optimasi persamaan yang berhubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Pada dasarnya masalah program linier bermuara pada upaya pencarian nilai-nilai yang optimal dari sebuah fungsi linier pada suatu kendala yang linier pula (Arsyad, 2005). Tujuan penggunaan program linier adalah menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan masalah. Kemudian dipilih kombinasi yang terbaik, dalam rangka menyusun strategi alokasi sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara optimal (Budiharsono, 2005).

Program Tujuan Ganda bukan berarti mempunyai banyak fungsi, modelnya sama dengan program linier yang hanya mempunyai satu fungsi tujuan. Akan tetapi pada program tujuan ganda fungsi tujuannya bertujuan untuk meminimumkan simpangan atau deviasi terhadap tujuan, target, atau sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kendala-kendala atau syarat ikatan yang ada, yaitu kendala tujuan (Budiharsono, 2005).

Ada beberapa model untuk menganalisis keunggulan komparatif suatu komoditi pada suatu wilayah, salah satunya adalah Analisis Biaya Sumber Daya Domestik (*domestic resource cost*). Penggunaan analisis



biaya sumber daya domestik (BSD) merupakan salah satu cara yang dapat menghindarkan kita dari misalokasi sumber daya. BSD ini merupakan salah satu kriteria untuk menilai investasi, khusus di bidang produksi barang dan jasa yang bersifat dapat diperdagangkan (Budiharsono, 2005).

Metode Skalogram dapat digunakan untuk menentukan peringkat pemukiman atau wilayah dan kelembagaan atau fasilitas pelayanan. Sedangkan metode sosiogram dimaksudkan untuk memperlihatkan secara grafis pola interaksi dan interdependensi melalui pergerakan penduduk antar pusat pemukiman di dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan sosial ekonomi. Pola tersebut dapat ditunjukkan pada peta-peta atas dasar preferensi penduduk dari suatu desa (pemukiman) terhadap fasilitas pelayanan dengan arah panah (Budiharsono, 2005).

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yakni: (a) Evaluasi kinerja, (b) Evaluasi *outcomes*, dan (c) Evaluasi kemampuan (kapasitas) pengelolaan. Evaluasi kinerja meliputi hal-hal yang berkaitan dengan mutu dan pelaksanaan kegiatan, dan tingkat pencapaian dari tujuan kegiatan. Evaluasi *outcomes* mencakup dampak dari kegiatan pengelolaan terhadap sumber daya pesisir dan masyarakat di wilayah pesisir tersebut. Sedangkan evaluasi kemampuan pengelolaan untuk menentukan kecukupan dari struktur dan proses pengelolaan, relatif terhadap standar dan pengalaman internasional (Budiharsono, 2005).

## **8. Teori Ekonomi Basis**

Teori ekonomi basis menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari suatu daerah. Proses produksi di sektor industri di suatu daerah yang menggunakan sumber daya produksi (SDP) lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku, dan *output*-nya diekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan penciptaan peluang kerja di daerah tersebut. Pertanyaan yang muncul dari teori ekonomi basis adalah sanggupkah setiap provinsi memanfaatkan peluang ekspor yang ada, terutama dalam era Otonomi Daerah dan era perdagangan bebas (Tambunan, 2001).

Logika dasar LQ adalah teori basis ekonomi yang intinya adalah industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun diluar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Selanjutnya, adanya arus pendapatan dari luar daerah ini akan menyebabkan kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut. Hal tersebut selanjutnya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap industri basis, tetapi juga menaikkan permintaan akan industri non basis. Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan dan juga industri lain (Widodo, 2006).

Teori ekonomi basis digunakan untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau non-basis. Ada beberapa metode pengukuran dalam teori ekonomi basis, yaitu metode pengukuran langsung dan metode pengukuran tidak langsung. Metode pengukuran langsung dapat dengan survei langsung untuk mengidentifikasi sektor mana yang merupakan sektor basis. Metode ini menentukan sektor basis dengan tepat. Akan tetapi metode ini memerlukan biaya, waktu, dan tenaga kerja yang banyak. Mengingat hal tersebut di atas, maka sebagian besar pakar ekonomi wilayah menggunakan metode pengukuran tidak langsung. Beberapa metode pengukuran tidak langsung, yaitu: (1) metode melalui pendekatan asumsi; (2) metode *Location Quotient*; (3) metode kombinasi pendekatan asumsi dan *Location Quotient*; (4) metode kebutuhan minimum (Budiharsono, 2005).

Menurut Arsyad (2004), *Location Quotient* merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperluas Analisis *Shift Share*. Teknik ini membantu untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat *self sufficiency* suatu sektor. Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan;

- a. Kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan *industry basic*.

- b. Kegiatan ekonomi atau industri yang hanya melayani pasar di daerah tersebut. Jenis ini dinamakan *industry non basic* atau industri lokal.

LQ adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (Kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. Dengan kata lain, LQ dapat menghitung perbandingan antara *share output* sektor *i* di kota dan *share output* sektor *i* di provinsi:

$$LQ = \frac{X_i^r / X^r}{X_i^n / X^n}$$

dengan  $X = \text{output (PDRB)}$

$r = \text{regional}$

$n = \text{nasional.}$

$LQ_i > 1$  mengindikasikan ada kegiatan ekspor di sektor tersebut atau sektor basis (B), sedangkan  $LQ_i \leq 1$  disebut sektor nonbasis (NB)

Ada beberapa keunggulan dari metode LQ, antara lain

- a) Metode LQ memperhitungkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung
- b) Metode LQ sederhana dan tidak mahal serta dapat diterapkan pada data histories untuk mengetahui *trend*.

Beberapa kelemahan Metode LQ adalah : (Bappenas, 2007)

- a) Berasumsi bahwa pola permintaan di setiap daerah identik dengan pola permintaan bangsa dan bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor regional sama dengan produktivitas tiap pekerja dalam industri-industri nasional.
- b) Berasumsi bahwa tingkat ekspor tergantung pada tingkat disagregasi.

## 9. Teori Komponen Pertumbuhan Wilayah

Keragaman dalam struktur industri menimbulkan perbedaan pertumbuhan output produksi dan kesempatan kerja. Wilayah yang tumbuh

cepat disebabkan karena struktur industri/sektornya mendukung dalam arti lain sebagian besar sektornya mempunyai laju pertumbuhan yang cepat. Sedangkan bagi wilayah yang pertumbuhannya lamban, sebagian besar sektornya mempunyai laju pertumbuhan lamban. Untuk mengidentifikasi sumber atau komponen pertumbuhan wilayah lazim digunakan analisis *Shift Share* (Budiharsono, 2005).

Analisis *shift share* merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional). Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lain, yaitu (Arsyad, 2004):

- a) Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan
- b) Pergeseran proporsional (*proportional shift*) mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan.
- c) Pergeseran diferensial (*differential shift*) membantu kita dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan.

Analisis wilayah/regional merupakan kegiatan utama dalam proses perencanaan pembangunan atau pengembangan wilayah. Analisis *shift-share* adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis data

statistik regional, baik berupa pendapatan per kapita, output, tenaga kerja maupun data lainnya. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengamati struktur perekonomian daerah dan perubahannya secara deskriptif, dengan cara menekankan bagian-bagian dari pertumbuhan sektor atau industri di daerah, dan memproyeksikan kegiatan ekonomi di daerah tersebut dengan data yang terbatas (Firdaus, 2007).

Penentuan komoditas unggulan dapat dijelaskan menggunakan analisis *shift-share*. Penentuan komoditas unggulan dicirikan oleh komponen *differential shift* (D) dan *proportional shift* (P). Komponen ini digunakan sebagai kriteria kinerja komoditas pada tahap pertama. Komponen D yang positif menunjukkan keunggulan komoditas tertentu dibandingkan dengan komoditas serupa di daerah lain, sedangkan komponen p yang positif menunjukkan komposisi industri yang sudah relatif baik dibandingkan dengan nasional (Firdaus, 2007).

## **B. Penelitian Terdahulu**

Annisah (2007) dalam penelitiannya tentang “*Identifikasi Sektor Pertanian dalam Penentuan Sektor Unggulan di Kabupaten Cirebon*” mengatakan bahwa dari analisis LQ, sektor perekonomian yang menjadi sektor basis adalah sektor pertanian; bangunan; perdagangan; pengangkutan dan komunikasi; keuangan; dan jasa. Subsektor tanaman perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan subsektor pertanian basis. Dengan menggunakan gabungan analisis LQ, PP, dan PPW dapat diketahui prioritas pengembangan sektor pertanian. sektor yang menjadi prioritas pertama untuk dikembangkan tidak ada. Prioritas kedua adalah sektor pertanian; bangunan; keuangan; persewaan dan jasa perusahaan; pengangkutan dan komunikasi; perdagangan; listrik, gas, dan air bersih; serta jasa. Prioritas ketiga adalah pertambangan dan penggalian. Prioritas keempat adalah industri pengolahan. Subsektor pertanian yang menjadi prioritas per-tama untuk dikembangkan adalah subsektor tanaman perkebunan dan peternakan, prioritas kedua yaitu

perikanan, prioritas ketiga adalah kehutanan, prioritas keempat tidak ada yang memenuhi, prioritas kelima adalah tanaman bahan makanan.

Berdasarkan hasil penelitian Lusminah (2008) yang berjudul “*Analisis Potensi Wilayah Kecamatan berbasis Komoditi Pertanian dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Cilacap ( Pendekatan Location Quotient dan Shift Share Analysis )*” dapat diketahui komoditi pertanian basis masing-masing kecamatan di Kabupaten Cilacap, Komoditi pertanian yang dipertimbangkan untuk di kembangkan di tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap adalah padi sawah di Kecamatan Kedungreja, Patimuan, Gandrungmangu, dan Cilacap Utara; padi gogo di Kecamatan Sidareja dan Jeruklegi; ketela pohon di Kecamatan Majenang, Karangpucung, Cipari, Cilacap Selatan, dan Cilacap Tengah; kacang hijau di Kecamatan Kampung Laut; tomat di Kecamatan Binangun; rambutan, manggis, karet dan kunyit di Kecamatan Dayeuhluhur; kapulogo di Kecamatan Majenang; kakao dan jambu mete di Kecamatan Jeruklegi; jati di Kecamatan Cimanggu; ayam ras pedaging di Kecamatan Maos dan Kroya; itik di Kecamatan Sampang; itik manila di Kecamatan Adipala; nila di Kecamatan Wanareja; lele di Kecamatan Kesugihan; udang tambak di Kecamatan Bantarsari dan Kawunganten; tongkol tuna, bawal putih, dan cucut di Kecamatan Cilacap Selatan; udang rebon di Kecamatan Cilacap Utara.

Chambali (2004) dalam penelitiannya “*Kontribusi Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Wonogiri dengan Pendekatan Analisis Location Quotient dan Shift Share*” dapat diketahui sektor perekonomian basis di Kabupaten Wonogiri adalah sektor pertanian, angkutan dan perusahaan, jasa-jasa dan pemerintahan dengan nilai LQ masing-masing 2,41; 1,79; 1,28 dan 1,57. Sedangkan untuk subsektor pertanian yang menjadi prioritas untuk dikembangkan adalah prioritas pertama tidak ada, prioritas kedua subsektor tanaman bahan pangan dan tanaman perkebunan, prioritas ketiga tidak ada, prioritas keempat subsektor perikanan dan peternakan, dan prioritas alternatif subsektor kehutanan.

Ropingi dan Agustono dalam penelitiannya yang berjudul “*Pembangunan Wilayah Kecamatan Berbasis Komoditi Pertanian di*

*Kabupaten Boyolali (Pendekatan Shift – Share Analisis)*” dapat diketahui komoditi pertanian basis di Kabupaten Boyolali yang paling banyak menjadi prioritas utama di masing-masing kecamatan (7 kecamatan) adalah jagung, diikuti komoditi kacang tanah menjadi prioritas utama di 5 kecamatan, ternak sapi dan buah rambutan menjadi prioritas utama di 4 kecamatan. Kecamatan yang paling banyak mempunyai komoditi basis prioritas utama adalah Kecamatan Kemusu.

Beberapa penelitian tersebut di atas digunakan sebagai referensi karena penelitian tersebut menggunakan metode analisis yang sama dengan penelitian ini yaitu analisis *Location Quotient* dan *Shift Share*.

### **C. Kerangka Teori Pendekatan Masalah**

Penerapan UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU RI No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka pembangunan tidak lagi dikendalikan secara ketat dari pusat namun sudah diserahkan kepada daerah kabupaten/kota dalam otonomi daerah yang seluas-luasnya. Dengan demikian, suatu daerah dituntut untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembangunan di daerahnya selaras dengan potensi dan kemampuan daerahnya sendiri.

Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah otonom dituntut untuk menentukan kebijakan dalam pembangunan di daerahnya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah dapat lebih efektif dan efisien jika perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan potensi daerahnya. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten harus mampu mengenali dengan baik potensi daerah sendiri, menggalang kemampuan untuk menggali, mengoptimalkan dan mengembangkan semua potensi daerah yang dimiliki dalam ruang lingkup pemerintahannya.

Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah yang luas yang terdiri dari 35 kabupaten dan kota, yang mana di setiap kabupaten dan kota tentunya

memiliki potensi yang berbeda-beda baik dalam sektor pertanian maupun sektor non pertanian. Analisis potensi wilayah kabupaten merupakan salah satu cara untuk mengenali dan menggali potensi daerah masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah baik di sektor pertanian maupun sektor non pertanian.

Potensi setiap daerah berbeda dengan daerah lainnya. Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor perekonomian yang meliputi sektor pertanian dan sektor non pertanian. Adapun sektor pertanian dibagi menjadi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan dan subsektor perikanan. Sektor non pertanian terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa, kegiatan-kegiatan lain yang tidak jelas batasannya.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah yang berkontribusi cukup besar, yaitu 20,03 % dari total PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 dengan subsektor tanaman bahan makanan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah.

Teori ekonomi basis dan teori komponen pertumbuhan merupakan teori yang dapat digunakan untuk mengetahui sektor atau subsektor perekonomian yang layak mendapat prioritas untuk dikembangkan di Provinsi Jawa Tengah dengan cara menganalisis data nilai produksi masing-masing sektor atau subsektor. Teori ekonomi basis dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran langsung ataupun tidak langsung. Metode pengukuran langsung dilakukan dengan melakukan survei secara langsung terhadap objek yang diteliti. Sedangkan metode tidak langsung ada 4 cara yaitu, metode pendekatan asumsi, metode *Location Quotient* (LQ), metode kombinasi, dan metode kebutuhan minimum. Dalam penelitian ini metode dari teori ekonomi basis yang digunakan adalah metode *Location Quotient* (LQ).

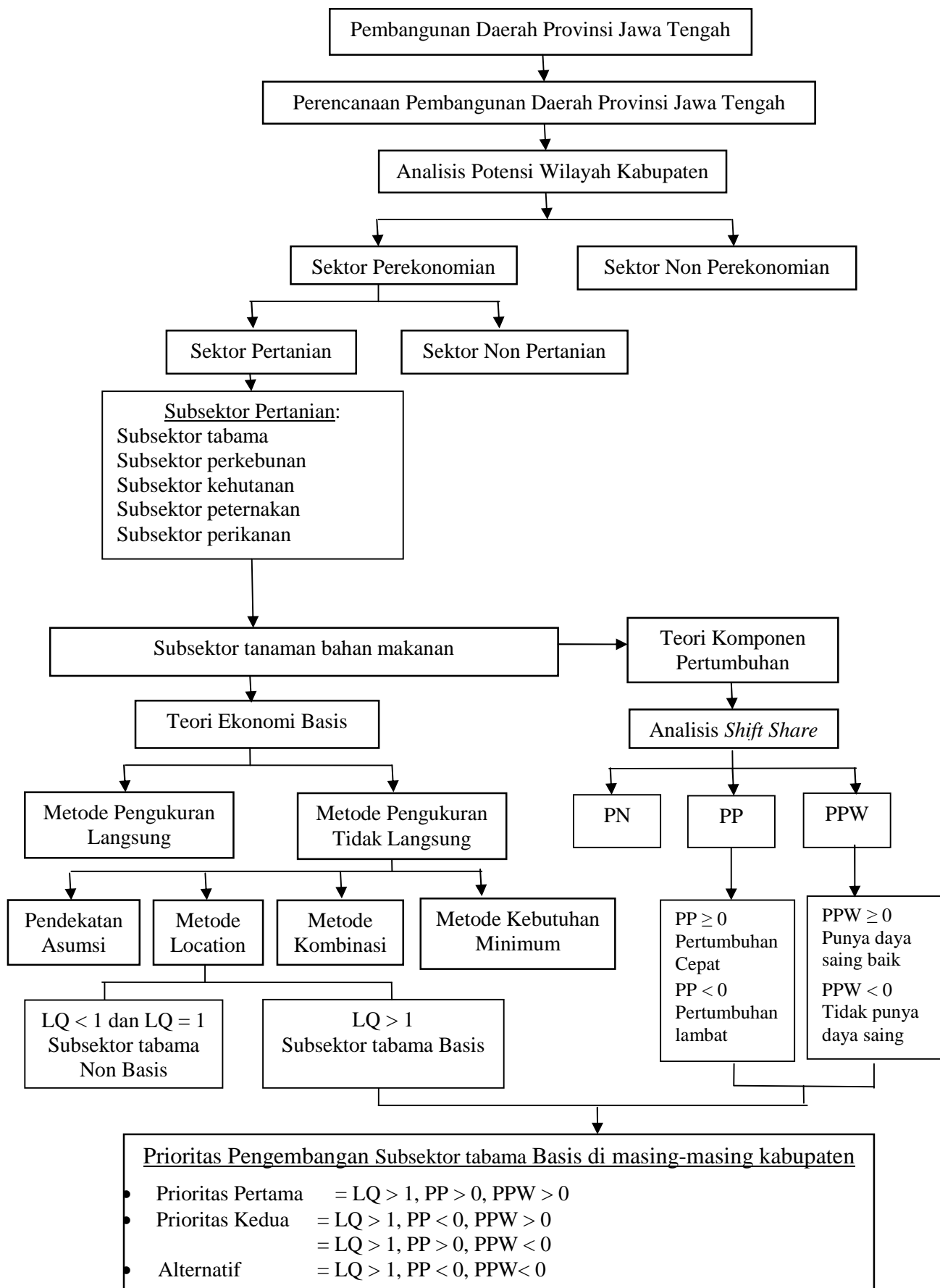
Metode *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui suatu subsektor di Provinsi Jawa Tengah termasuk subsektor basis atau non basis di masing-masing kabupaten dengan cara menghitung nilai LQ dari setiap subsektor di Provinsi Jawa Tengah. Apabila nilai  $LQ > 1$  maka subsektor tersebut termasuk subsektor basis. Apabila nilai  $LQ \leq 1$  maka subsektor tersebut termasuk subsektor non basis.

Teori komponen pertumbuhan (analisis *Shift Share*) digunakan untuk mengetahui komponen pertumbuhan subsektor basis di tiap-tiap kabupaten di



Provinsi Jawa Tengah. Komponen pertumbuhan dalam analisis *Shift Share* meliputi komponen pertumbuhan nasional (PN), komponen pertumbuhan proporsional (PP), dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW). Apabila PP positif, maka subsektor tersebut pertumbuhannya cepat dan sebaliknya apabila PP negatif, maka subsektor tersebut pertumbuhannya lambat. Apabila PPW positif, maka subsektor tersebut mempunyai daya saing yang baik jika dibandingkan dengan subsektor yang sama di wilayah lainnya dan sebaliknya apabila PPW negatif, maka subsektor tersebut tidak mempunyai daya saing jika dibandingkan dengan subsektor yang sama di wilayah lainnya.

Penentuan prioritas subsektor basis yang layak dikembangkan dalam pembangunan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan menggunakan gabungan analisis Ekonomi Basis (metode LQ) dan analisis *Shift Share* (analisis komponen pertumbuhan proporsional/PP dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah/PPW). Subsektor basis yang menjadi prioritas pertama untuk dikembangkan adalah subsektor yang mempunyai nilai  $LQ > 1$ , PP positif dan PPW positif. Subsektor basis yang menjadi prioritas kedua untuk dikembangkan adalah subsektor yang mempunyai nilai  $LQ > 1$ , PP negatif, PPW positif dan atau subsektor yang mempunyai nilai  $LQ > 1$ , PP positif, PPW negatif. Subsektor basis yang menjadi prioritas alternatif untuk dikembangkan adalah subsektor yang mempunyai nilai  $LQ > 1$ , PP negatif, dan PPW negatif. Alur pemikiran dalam penelitian ini di jelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Alur Pemikiran Dalam Penentuan Prioritas Pengembangan Subsektor Tanaman Bahan Makanan Basis Masing-masing Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

#### **D. Pembatasan Masalah**

1. Penelitian ini memusatkan pada analisis data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) subsektor tanaman bahan makanan di masing-masing kabupaten di Provinsi Jawa Tengah periode 2003-2007.
2. Data yang diteliti adalah data subsektor tanaman bahan makanan di masing-masing kabupaten di Provinsi Jawa Tengah periode 2003-2007, yang datanya tersedia, dipublikasikan, dan kontinuitasnya terjaga.

#### **E. Asumsi-asumsi**

1. Kebutuhan barang akan dipenuhi terlebih dahulu oleh produksi sendiri dan kekurangannya akan dipenuhi dari kabupaten lain yang berada di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah maupun di luar Provinsi Jawa Tengah.
2. Terdapat pola permintaan yang sama antara kabupaten dengan Provinsi Jawa Tengah.

#### **F. Definisi Operasional dan Konsep Pengukuran Variabel**

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.
3. Daerah adalah suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya bergantung secara internal. Dalam penelitian ini, yang dimaksud daerah adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
4. Subsektor tanaman bahan makanan adalah subsektor perekonomian yang dalam proses produksinya berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman penghasil bahan makanan.
5. Subsektor tanaman bahan makanan basis adalah subsektor tanaman bahan makanan yang mampu memenuhi kebutuhan di suatu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah serta dapat diekspor ke wilayah lain. Subsektor tanaman bahan makanan basis menurut analisis *Location Quotient* (LQ) adalah subsektor tanaman bahan makanan yang mempunyai nilai  $LQ > 1$ .
6. Subsektor tanaman bahan makanan non basis adalah subsektor tanaman bahan makanan yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi

kebutuhan di wilayahnya maupun yang hanya mampu memenuhi kebutuhan di wilayahnya dan tidak dapat diekspor ke wilayah lain. Subsektor tanaman bahan makanan non basis menurut analisis *Location Quotient* (LQ) adalah subsektor tanaman bahan makanan yang mempunyai nilai  $LQ \leq 1$

7. Ekspor adalah menjual hasil produksi subsektor tanaman bahan makanan ke luar wilayah baik ke wilayah lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam penelitian ini ekspor adalah menjual hasil produksi subsektor tanaman bahan ke luar wilayah kabupaten baik di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah maupun di luar wilayah Provinsi Jawa Tengah.
8. Pertumbuhan Proporsional (PP) adalah pertumbuhan nilai produksi suatu subsektor tanaman bahan makanan dibandingkan dengan subsektor lain di tingkat kabupaten yang disebabkan oleh faktor dari luar, misalnya perbedaan ketersediaan faktor produksi, perbedaan kebijakan pemerintah di bidang pertanian, perbedaan struktur dan keragaman pasar. Nilai PP positif menunjukkan bahwa Subsektor tanaman bahan makanan yang diteliti pertumbuhannya cepat, sedangkan nilai PP negatif menunjukkan Subsektor tanaman bahan makanan yang diteliti pertumbuhannya lambat.
9. Pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) adalah pertumbuhan nilai produksi Subsektor tanaman bahan makanan di wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan subsektor yang sama yang sama di wilayah lain yang disebabkan oleh faktor dari dalam wilayah tersebut (faktor lokasional) misalnya kondisi alam, akses pasar, fasilitas ekonomi yang dimiliki oleh suatu wilayah. Nilai PPW positif menunjukkan subsektor tanaman bahan makanan yang diteliti mempunyai daya saing yang baik, sedangkan nilai PPW negatif menunjukkan subsektor tanaman bahan makanan yang diteliti tidak mempunyai daya saing.
10. Prioritas adalah yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain.
11. Prioritas pengembangan subsektor tanaman bahan makanan basis adalah penentuan prioritas subsektor tanaman bahan makanan basis yang akan dikembangkan di Provinsi Jawa Tengah, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Subsektor tanaman bahan makanan basis yang menjadi prioritas pertama untuk dikembangkan di kabupaten di Provinsi Jawa Tengah adalah subsektor tanaman bahan makanan basis ( $LQ > 1$ ) yang mempunyai nilai PP positif dan PPW positif.
- b. Subsektor tanaman bahan makanan basis yang menjadi prioritas kedua untuk dikembangkan di kabupaten di Provinsi Jawa Tengah adalah subsektor tanaman bahan makanan basis ( $LQ > 1$ ) yang mempunyai nilai, PP negatif, PPW positif dan atau subsektor tanaman bahan makanan basis ( $LQ > 1$ ) yang mempunyai nilai, PP positif, PPW negatif.
- c. Subsektor tanaman bahan makanan basis yang menjadi prioritas alternatif untuk dikembangkan di Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah adalah subsektor tanaman bahan makanan basis ( $LQ > 1$ ) yang mempunyai PP negatif, dan PPW negatif.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Dasar Penelitian**

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Penelitian deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitik bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi informasi apa adanya sesuai variabel-variabel yang diteliti. Penelitian semacam ini sering dilakukan oleh pejabat-pejabat guna mengambil kebijakan atau keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam melakukan tugasnya (Mardalis, 2004).

## B. Metode Pengambilan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, dengan pertimbangan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke-3 setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (lihat Tabel 2). Dari total PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah, subsektor tanaman bahan makanan selama tahun 2003-2007 merupakan subsektor dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai yang relatif stabil.

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Atas Harga Konstan 2000 di Jawa Tengah Tahun 2003-2007

No	Lapangan Usaha	26	2003	2004	2005	2006	2007
1.	<b>Tanaman Bahan Makanan</b>		<b>69,92</b>	<b>70,12</b>	<b>70,52</b>	<b>70,62</b>	<b>70,58</b>
2.	Tanaman Perkebunan		8,44	8,35	8,26	8,13	8,30

3.	Peternakan	12,37	12,36	12,34	12,33	12,46
4.	Kehutanan	3,66	3,71	3,69	3,67	3,59
5.	Perikanan	5,61	5,46	5,19	5,25	5,07
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2008

Subsektor tanaman bahan makanan meliputi padi, palawija, dan tanaman hortikultura (sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias). Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui sumbangan subsektor tanaman bahan makanan terhadap sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah relatif tinggi dan cenderung naik setiap tahunnya yaitu sebesar 69,92% pada tahun 2003; 70,12% pada tahun 2004; 70,52% pada tahun 2005; 70,62% pada tahun 2006 dan 70,58% pada tahun 2007. Hal-hal tersebut menyebabkan sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting bagi perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

### C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan lembaga lainnya yang bukan pengolahnya, tetapi dapat di manfaatkan dalam suatu penelitian tertentu (Ruslan, 2004). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Data sekunder tersebut meliputi data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tiap kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 .

### D. Metode Analisis Data

#### 1. Analisis Subsektor tanaman bahan makanan Basis

Analisis yang digunakan untuk menentukan subsektor tanaman bahan makanan di Jawa Tengah termasuk dalam komoditi pertanian basis

atau non basis adalah analisis *Location Quotient* (LQ). Besarnya nilai LQ diperoleh dari persamaan berikut :

$$LQ = \frac{k_i^j / k^j}{K_i^n / K^n}$$

Keteranga

n :

LQ : Indeks *Location Quotient* komoditi pertanian i di tingkat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

$k_i^j$  : PDRB subsektor tanaman bahan makanan kabupaten j di Provinsi Jawa Tengah

$k^j$  : PDRB sektor pertanian kabupaten j di Provinsi Jawa Tengah

$K_i^n$  : PDRB subsektor tanaman bahan makanan di Provinsi Jawa Tengah

$K^n$  : PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah

Dengan

Kriteria :

Jika nilai  $LQ > 1$  artinya subsektor tanaman bahan makanan merupakan sektor basis. Subsektor tanaman bahan makanan tidak saja hanya dapat memenuhi kebutuhan wilayah sendiri tetapi juga dapat mengekspor ke luar wilayah.

Jika nilai  $LQ \leq 1$  artinya subsektor tanaman bahan makanan tergolong sektor non basis. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu mengekspor atau produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar.

## 2. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah Subsektor Tanaman Bahan Makanan Basis

Analisis yang digunakan untuk mengetahui komponen pertumbuhan wilayah subsektor tanaman bahan makanan basis di Provinsi Jawa Tengah adalah analisis *Shift Share*. Komponen pertumbuhan wilayah dalam analisis *Shift Share* meliputi komponen pertumbuhan nasional (PN), pertumbuhan proporsional (PP), dan pertumbuhan pangsa wilayah (PPW).



Dalam penelitian ini komponen pertumbuhan wilayah yang digunakan hanya komponen pertumbuhan proporsional (PP) dan komponen pertumbuhna pangsa wilayah (PPW). Analisis komponen pertumbuhan wilayah menggunakan model analisis *shift share*. Menurut Budiharsono (2005) analisis *shift share* secara matematik dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\Delta K_{ij} = PN_{ij} + PP_{ij} + PPW_{ij}$$

Atau

secara rinci dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$(K'_{ij} - K_{ij}) = \Delta K_{ij} = K_{ij} (R_a - 1) + K_{ij} (R_i - R_a) + K_{ij} (r_i - R_i)$$

$$r_i = K'_{ij}/K_{ij}$$

$$R_i = K'_i/K_i$$

$$R_a = K'_{..}/K_{..}$$

$$PN_{ij} = (R_a - 1) \times K_{ij}$$

$$PP_{ij} = (R_i - R_a) \times K_{ij}$$

$$PPW_{ij} = (r_i - R_i) \times K_{ij}$$

Keterangan:

$\Delta K_{ij}$  = Perubahan PDRB subsektor tanaman bahan makanan di kabupaten j

$K_{ij}$  = PDRB subsektor tanaman bahan makanan di kabupaten j pada tahun analisis

$K'_{ij}$  = PDRB subsektor tanaman bahan makanan di kabupaten j pada akhir tahun analisis

$K_i$  =  $\sum_{j=1}^m K_{ij}$  = PDRB subsektor tanaman bahan makanan Provinsi Jawa Tengah pada tahun dasar analisis

$K'_i$  =  $\sum_{j=1}^m K'_{ij}$  = PDRB subsektor tanaman bahan makanan Provinsi Jawa Tengah pada tahun akhir analisis

$K_{..}$  =  $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m K_{ij}$  = PDRB sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah pada tahun dasar analisis

$$K'_{..} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m K'_{ij} = \text{PDRB sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah}$$

pada tahun akhir analisis

$R_a - 1$  = Persentase perubahan PDRB subsektor tanaman bahan makanan kabupaten j yang disebabkan komponen pertumbuhan nasional

$R_i - R_a$  = Persentase perubahan PDRB subsektor tanaman bahan makanan kabupaten j yang disebabkan komponen pertumbuhan proporsional

$r_i - R_i$  = Persentase perubahan PDRB subsektor tanaman bahan makanan kabupaten j yang disebabkan komponen pertumbuhan pangsa wilayah.

Dengan kriteria:

- 1) Apabila  $PP_{ij}$  positif, maka subsektor tanaman bahan makanan di kabupaten j pertumbuhannya cepat.
- 2) Apabila  $PP_{ij}$  negatif, maka subsektor tanaman bahan makanan di kabupaten j pertumbuhannya lambat.
- 3) Apabila  $PPW_{ij}$  positif, maka subsektor tanaman bahan makanan di kabupaten j mempunyai daya saing yang baik jika dibandingkan dengan subsektor tanaman bahan makanan yang sama di wilayah lainnya.
- 4) Apabila  $PPW_{ij} < 0$ , maka subsektor tanaman bahan makanan di kabupaten j tidak dapat bersaing dengan baik jika dibandingkan dengan subsektor tanaman bahan makanan yang sama di wilayah lainnya.

### **3. Analisis Penentuan Prioritas Pengembangan Subsektor Tanaman Bahan Makanan Basis**

Analisis yang digunakan dalam penentuan prioritas pengembangan subsektor tanaman bahan makanan basis di Provinsi Jawa Tengah adalah analisis gabungan *Location Quotient* dan *Shift Share* (dalam penelitian ini hanya komponen PP dan PPW) dengan kriteria sebagai berikut.

Tabel 5. Penentuan Prioritas Pengembangan Subsektor Tanaman Bahan

Makanan Basis di Provinsi Jawa Tengah

Prioritas	LQ	PP	PPW
Prioritas Pertama	> 1	Positif	Positif
Prioritas Kedua	> 1	Negatif	Positif
	> 1	Positif	Negatif
Prioritas Alternatif	> 1	Negatif	Negatif